



REKONSTRUKSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENGATASI PENGANGGURAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH

Saipul Nasution¹, Muhammad Azrul Amirullah², Jamhuri³ Mokmin Bin Basri⁴

Universitas Darussalam Gontor^{1,2}

Universitas Islam Negeri Ar Raniry³

Universiti Islam Antarabangsa Selangor Malaysia⁴

saipul.nasution@unida.gontor.ac.id, muhammadazrulamirullah62@student.pm.unida.gontor.ac.id, jamhuri@ar-raniry.ac.id, mokmin@uis.adu.my

Received: 18-02-2026

Revised: 17-03-2026

Approved: 03-04-2026

Abstract: The high unemployment rate indicates an imbalance between job availability and the quality of human resources (HR) produced by the national development system. Most HR development policies are still oriented towards conventional economic approaches that emphasize productivity and economic growth alone, thus paying little attention to the dimensions of ethics, social justice, and holistic human welfare. This study aims to analyze the role of human resource development in addressing unemployment through the perspective of Maqasid al-Shari'ah and to formulate a framework for reconstructing public policy based on Islamic political values. This study uses a qualitative method with a library research approach that examines classical and contemporary literature in the fields of Islamic politics, Islamic economics, and normative sources such as the Qur'an and hadith related to the concept of work and human development. Data analysis is conducted descriptively-qualitatively through normative-theological and sociological approaches to connect Islamic principles with human resource development strategies in the modern context. The results show that Islam views HR development as an integral process that encompasses the development of human intellectual, spiritual, and moral aspects. Within the framework of Maqasid al-Shari'ah, efforts to address unemployment are closely related to the protection of human reason, life, and property. Therefore, the state has a strategic responsibility to formulate policies on education, job training, economic empowerment, and equitable job creation. This research confirms that integrating the values of the maqasid al-Shari'ah into human resource development policies can be an alternative approach to addressing unemployment while achieving sustainable social welfare.

Keywords: *Human Resource Development; Unemployment; Islamic Politics; Maqasid Al-Shari'ah, Public Policy.*



Abstrak: Tingginya tingkat pengangguran menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan oleh sistem pembangunan nasional. Sebagian besar kebijakan pembangunan SDM masih berorientasi pada pendekatan ekonomi konvensional yang menekankan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi semata, sehingga kurang memperhatikan dimensi etika, keadilan sosial, dan kesejahteraan manusia secara holistik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembangunan sumber daya manusia dalam mengatasi pengangguran melalui perspektif *Maqasid al-Shari'ah* serta merumuskan kerangka rekonstruksi kebijakan publik berbasis nilai-nilai politik Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* yang mengkaji literatur klasik dan kontemporer dalam bidang politik Islam, ekonomi Islam, serta sumber-sumber normatif seperti Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan konsep kerja dan pembangunan manusia. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui pendekatan normatif-teologis dan sosiologis guna menghubungkan prinsip-prinsip Islam dengan strategi pembangunan sumber daya manusia dalam konteks modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memandang pembangunan SDM sebagai proses integral yang mencakup pengembangan aspek intelektual, spiritual, dan moral manusia. Dalam kerangka maqasid al-syari'ah, upaya penanggulangan pengangguran berkaitan erat dengan perlindungan terhadap akal, jiwa, dan harta manusia. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab strategis dalam merumuskan kebijakan pendidikan, pelatihan kerja, pemberdayaan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja yang berkeadilan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai maqasid al-syari'ah dalam kebijakan pembangunan SDM dapat menjadi pendekatan alternatif dalam mengatasi pengangguran sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Kata kunci: Pembangunan Sumber Daya Manusia; Pengangguran; Politik Islam; *Maqasid Al-Syari'ah*; Kebijakan Publik.

PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan permasalahan multidimensi yang berdampak langsung terhadap kestabilan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Tingginya angka pengangguran tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan angkatan kerja, tetapi juga menjadi indikator lemahnya sistem pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam suatu negara. Dalam perspektif pembangunan nasional, SDM merupakan pilar utama yang menentukan arah dan keberlanjutan suatu bangsa, sebab kualitas manusia menjadi titik tolak bagi



kemajuan peradaban dan daya saing global sehingga menempatkannya sebagai isu sentral dalam paradigma pembangunan kontemporer.¹

Namun demikian, berbagai kebijakan pembangunan SDM yang telah dilaksanakan seringkali masih berorientasi pada pendekatan ekonomi konvensional yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi semata. Pendekatan tersebut terkadang kurang memperhatikan dimensi etika, keadilan sosial, dan kesejahteraan holistik umat.² Akibatnya, meskipun berbagai program pembangunan SDM telah dijalankan, tingkat pengangguran masih menjadi masalah struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang selama ini digunakan cenderung bersifat parsial dan belum mampu menyentuh akar persoalan secara komprehensif. Dalam banyak kasus, program-program tersebut lebih berfokus pada peningkatan kapasitas teknis dan keterampilan kerja, namun kurang diimbangi dengan penguatan aspek kualitas pendidikan, relevansi kompetensi dengan kebutuhan pasar, serta pembentukan karakter dan etos kerja yang adaptif terhadap dinamika ekonomi modern.

Konsep pembangunan dalam Islam tidak semata-mata diarahkan pada aspek material, melainkan mencakup pengembangan potensi ruhani, akal, dan etika. Dengan kata lain, pembangunan SDM yang holistik bertujuan membentuk insan kamil yang mampu menunaikan amanah kekhalifahan di muka bumi. Sejalan dengan itu, Islam sangat menjunjung tinggi nilai kerja dan menolak kemalasan atau ketergantungan.³ Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلَهُ، فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ، فَيَخْتَطِبُ، ثُمَّ يَبِيعُ، فَيَأْكُلُ، وَيَبْضُقُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ

“Sungguh, seseorang dari kalian mengambil tali, lalu pergi mencari kayu bakar dan menjualnya adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada manusia.”⁴

Hadis ini mencerminkan bahwa Islam mendorong manusia untuk bekerja keras dan tidak menggantungkan hidup kepada orang lain.

¹ Ilhamie Abdul Ghani Azmi, “Human Capital Development and Organizational Performance: A Focus on Islamic Perspective,” *Jurnal Syariah* 17, no. 2 (2009): 353–372.

² Muhammad Hi Hasan, “Human Capital in Islamic Perspective,” *Proceedings of International Conference of Business and Social Sciences (ICOBUSS)* 1, no. 1 (2020): 155–165.

³ Jahroni and Didit Darmawan, “Islamic Human Capital Implementation as Effective Framework in Islamic Human Capital Management,” *Journal of Social Science Studies* 1, no. 2 (2021): 101–113.

⁴ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari: Terjemah Lengkap*, trans. Muhammad Muhsin Khan (Riyadh: Darussalam, 1997), hadis no. 1471.



Dengan demikian, menanggulangi pengangguran dalam pandangan politik Islam tidak dapat dipisahkan dari strategi pengembangan SDM secara sistemik dan bernilai syar'i. Pemerintah, sebagai pelaksana amanat kekuasaan dalam Islam, memiliki kewajiban untuk menciptakan kebijakan yang mendorong pemberdayaan individu, pelatihan kerja, dan penyediaan akses ekonomi yang adil. Kajian ini akan menelaah bagaimana politik Islam memosisikan pembangunan SDM sebagai instrumen kunci dalam menanggulangi pengangguran dan menciptakan tatanan sosial yang berkeadilan.⁵

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan mengintegrasikan pendekatan maqasid al-syari'ah dalam perumusan kebijakan pembangunan sumber daya manusia, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana konsep maqasid al-syari'ah dapat digunakan sebagai kerangka normatif dalam merekonstruksi kebijakan pembangunan sumber daya manusia guna mengatasi permasalahan pengangguran.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif berbasis kajian kepustakaan (*library research*) yang mengkaji peran pembangunan sumber daya manusia dalam menanggulangi pengangguran dari perspektif politik Islam. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber-sumber primer berupa literatur klasik dan kontemporer dalam bidang politik Islam, ekonomi Islam, serta hadis dan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep kerja, pembangunan, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, jurnal ilmiah, buku referensi, hasil penelitian terdahulu, dan laporan lembaga internasional tentang pengangguran juga dijadikan sebagai bahan pendukung.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menelaah isi dan makna dari teks-teks yang dikaji untuk menemukan benang merah antara nilai-nilai politik Islam dan strategi pembangunan sumber daya manusia. Data dianalisis dengan pendekatan normatif-teologis dan sosiologis, guna memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diaplikasikan dalam kebijakan pembangunan manusia sebagai upaya menurunkan angka pengangguran.

Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, tetapi fokus pada interpretasi dan sintesis dari pemikiran para ulama, pemikir Muslim kontemporer, serta data-data statistik yang relevan. Melalui pendekatan ini,

⁵ Ercan Yilmaz, "Behavioral and Islamic Economics Critique Mainstream Views on Unemployment: A Joint Perspective," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 3 (2023): 417–434.



diharapkan dapat ditemukan tawaran teoritis dan praktis yang bersumber dari politik Islam dalam menanggapi persoalan ketenagakerjaan dan pembangunan SDM di era modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam Konteks Islam

Dalam Islam, manusia memiliki posisi sentral sebagai khalifah di muka bumi. Tugas kekhalifahan tersebut menuntut pengembangan potensi manusia secara menyeluruh baik jasmani, intelektual, maupun spiritual. Konsep ini membentuk fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) menurut Islam, yang tidak hanya diarahkan pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga integritas moral dan kesadaran ketuhanan (taqwa).⁶

Pembangunan SDM dalam Islam berpijak pada prinsip *maqasid al-syari'ah*, terutama dalam menjaga dan mengembangkan potensi akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, negara atau pemimpin Islam dituntut untuk menciptakan kebijakan yang mendorong pendidikan, pelatihan kerja, pengembangan karakter, dan pemberdayaan ekonomi. Hal ini sejalan dengan perintah Allah SWT dalam QS. al-Mulk: 15,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.

Ayat ini menjadi dalil kuat dalam Islam tentang pentingnya aktivitas ekonomi, mobilitas, dan ikhtiar manusia dalam mencari nafkah. Pemberdayaan sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas adalah wujud nyata dari perintah "berjalanlah di muka bumi dan makanlah dari rezeki-Nya."

Dengan demikian, Islam tidak membenarkan kemalasan atau ketergantungan, tetapi mengajarkan kerja keras, inovasi, dan tanggung jawab dalam memakmurkan bumi.

⁶ Muhammad Hi Hasan, "Human Capital in Islamic Perspective," *Proceedings of International Conference of Business and Social Sciences (ICOBUSS)* 1, no. 1 (2020): 155–165.



2. Dimensi Politik Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Politik Islam (siyasah shar'iyah) adalah bentuk manajemen kekuasaan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umum dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk menciptakan iklim kerja yang sehat dan produktif. Pengangguran bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan distribusi sumber daya dan peran negara sebagai pengatur sistem kehidupan.⁷

Dalam pandangan al-Mawardi, salah satu tugas pemerintah adalah mengatur ekonomi masyarakat agar tidak terjadi stagnasi dan ketimpangan.⁸ Penciptaan lapangan kerja menjadi bagian dari tanggung jawab politik seorang pemimpin, bukan hanya sebagai kebijakan ekonomi teknokratis, tetapi juga sebagai bentuk penunaian amanah kekuasaan. Jika pengangguran dibiarkan, maka akan menimbulkan kemiskinan struktural, ketergantungan, bahkan potensi kriminalitas dan kehancuran moral masyarakat.

3. Konsep Kerja dalam Islam dan Kaitannya dengan Pembangunan SDM

Islam memandang kerja (amal) sebagai bentuk ibadah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ فَيَخْتَطِبُ، ثُمَّ يَبِيعُ، فَيَأْكُلُ وَيَصَدَّقُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطُوا أَوْ مَنَعُوا

"Sungguh, jika salah seorang dari kalian mengambil tali, lalu pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar, kemudian menjualnya dan memakan hasilnya serta bersedekah, itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia."⁹

Hadis ini memperlihatkan bahwa Islam mengajarkan kemandirian ekonomi dan menolak budaya meminta-minta. Kerja yang halal adalah bentuk aktualisasi diri sebagai hamba Allah dan pemimpin di muka bumi. Oleh karena itu, pembangunan SDM dalam Islam bukan hanya bertujuan meningkatkan

⁷ Jahroni dan Didit Darmawan, "Islamic Human Capital Implementation as Effective Framework in Islamic Human Capital Management," *Journal of Social Science Studies* 1, no. 1 (2021): 239–244.

⁸ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Kairo: Maktabah Dar al-Turath, 1960), 234.

⁹ Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *sahih al-Bukhari*. Kitab al-Zakah, Bab: Al-Istighna' 'an al-Nas. Hadis No. 1470. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.



produktivitas, tetapi juga menciptakan manusia yang bertanggung jawab secara sosial dan spiritual.

4. Pembangunan SDM dalam Konteks Pengangguran: Tinjauan Sosiologis-Islam

Pengangguran seringkali disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan individu dengan kebutuhan pasar kerja (*mismatch*). Dalam hal ini, pendekatan Islam terhadap pembangunan SDM mencakup prinsip kecocokan (*kifa'ah*) antara potensi manusia dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan vokasional, pelatihan wirausaha, serta pelibatan masyarakat dalam aktivitas produktif menjadi solusi utama.

Ibn Khaldun dalam Muqaddimah-nya menekankan pentingnya solidaritas sosial (*'ashabiyyah*) dalam membangun kekuatan ekonomi.¹⁰ Negara harus menjadi fasilitator terciptanya jaringan sosial produktif yang mendorong aktivitas kerja, bukan menjadi entitas pasif. Dalam hal ini, pembangunan SDM menjadi strategi sistemik untuk mengurangi pengangguran struktural dan membuka peluang kerja berbasis komunitas.

5. Kebijakan Publik Islam dan Peran Pemerintah

Dalam literatur politik Islam, kebijakan publik harus mencerminkan kemaslahatan umat. Konsep masalah mursalah memberikan ruang bagi negara untuk merumuskan kebijakan pembangunan SDM yang tidak secara eksplisit disebut dalam nash, tetapi sejalan dengan ruh syariat. Ini termasuk pembangunan infrastruktur pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, program pelatihan kerja, dan penyediaan akses terhadap sumber daya ekonomi.¹¹

Adapun contohnya bisa dilihat dari kebijakan Umar bin Khattab yang mengembangkan sistem keuangan publik (*baitul mal*), menetapkan tunjangan bagi yang tidak mampu, serta membuka akses kerja bagi masyarakat terpinggirkan. Pendekatan Umar menggabungkan antara spiritualitas dan rasionalitas dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

6. Kritik terhadap Pendekatan Pembangunan Konvensional

Model pembangunan modern yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) tidak serta-merta menyelesaikan masalah pengangguran.

¹⁰ Khoiruddin, "Analisis Teori 'Ashabiyyah Ibn Khaldun sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat," *ASAS: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (Januari 2016): 1–12.

¹¹ Ahmad Izzan, "Masalah sebagai Landasan Formulasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (Desember 2013): 277–289.



Pendekatan ini kerap kali mengabaikan distribusi keadilan dan pembangunan manusia seutuhnya. Dalam kerangka Islam, pembangunan harus bersifat berkelanjutan dan berkeadilan. Sumber daya manusia bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga subjek yang harus dimuliakan. Lebih lanjut, ketidaksesuaian antara output sistem pendidikan dengan kebutuhan industri (mismatch) serta terbatasnya penciptaan lapangan kerja produktif turut memperparah kondisi tersebut. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan pembangunan SDM dengan realitas struktural di lapangan, sehingga menimbulkan inefisiensi dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan teknologi, globalisasi ekonomi, dan disrupsi digital juga memberikan tekanan tambahan yang memperumit upaya pengurangan pengangguran.¹²

Dengan demikian, permasalahan pengangguran tidak dapat dipahami semata sebagai isu ekonomi, melainkan sebagai persoalan multidimensional yang memerlukan pendekatan integratif, sistemik, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi paradigma pembangunan sumber daya manusia yang tidak hanya berorientasi pada aspek kuantitatif, tetapi juga menekankan kualitas, relevansi, serta nilai-nilai yang mampu mendorong produktivitas dan kemandirian individu dalam jangka panjang

Yilmaz dalam kajiannya menyatakan bahwa ekonomi Islam mengkritik model pasar bebas yang menyebabkan ketimpangan dan memperparah pengangguran. Sebaliknya, Islam menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, solidaritas, dan intervensi negara dalam menjaga keseimbangan sosial. Oleh karena itu, pembangunan SDM harus didesain sebagai proyek peradaban, bukan sekadar investasi ekonomi.¹³

7. Relevansi Maqasid al-Syari'ah dalam Pembangunan SDM

Pendekatan *maqasid al-syari'ah* memberikan kerangka komprehensif dalam pembangunan SDM. Menjaga akal, harta, dan jiwa merupakan bagian dari tujuan utama syariat yang bersinggungan langsung dengan pemberdayaan manusia. Ketika pemerintah melaksanakan program pelatihan kerja, pendidikan berkualitas,

¹² Aye Sudarto, Ani Nurul Imtihanah, dan Rina Elmaza, "Human Development Index and Maqoshid Syariah," *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2023): 95–105, 97.

¹³ Ekrem Yilmaz, "Behavioral and Islamic economics critique mainstream views on unemployment: a joint perspective," *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 16, no. 4 (2023): 838–852, 840.



dan perlindungan tenaga kerja, maka sejatinya ia tengah menegakkan *maqasid al-syari'ah* itu sendiri.¹⁴

Pengangguran dalam perspektif *maqasid* tidak hanya berarti kehilangan penghasilan, tetapi juga potensi hilangnya harga diri, kehormatan keluarga, dan meningkatnya kerentanan sosial. Oleh karena itu, upaya menanggulangi pengangguran adalah bagian dari jihad sosial dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan.

8. Tantangan dan Solusi: Menuju Sistem Politik Islam Berbasis Kesejahteraan

Penerapan nilai-nilai Islam dalam pembangunan SDM dan penanggulangan pengangguran dihadapkan pada tantangan struktural: ketimpangan pendidikan, ekonomi eksklusif, serta lemahnya integrasi antara ulama dan pengambil kebijakan. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara lembaga pendidikan Islam, pesantren, institusi negara, dan sektor industri dalam menciptakan sistem pengembangan SDM berbasis nilai Islam.

Negara juga harus memperkuat fungsi pelayanan publik, mendorong reformasi pendidikan berbasis kebutuhan dunia kerja, serta mendukung program kewirausahaan yang berlandaskan syariat. Dalam jangka panjang, penguatan SDM Muslim akan menghasilkan masyarakat yang mandiri secara ekonomi, berintegritas secara moral, dan siap mengemban tanggung jawab sosial.

Pengangguran merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Tingginya angka pengangguran tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi semata, melainkan juga pada stabilitas sosial, politik, dan moral masyarakat. Dalam menghadapi realitas ini, berbagai pendekatan telah dikembangkan oleh negara, terutama melalui kebijakan ekonomi dan pembangunan yang difokuskan pada penciptaan lapangan kerja dan pelatihan tenaga kerja. Namun demikian, banyak pendekatan tersebut cenderung mengabaikan dimensi spiritual, etika, dan tujuan hidup manusia secara menyeluruh.

Dalam perspektif Islam, pembangunan bukan semata-mata untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan sosial, keseimbangan spiritual, dan pemuliaan terhadap martabat

¹⁴ M. Amin Suma, "Maqashid Syariah dan Implikasinya terhadap Pembangunan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2007): 152.



manusia. Islam memandang manusia tidak hanya sebagai alat produksi (faktor ekonomi), tetapi sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam Islam harus diarahkan pada terbentuknya pribadi yang unggul secara intelektual, spiritual, dan sosial.

Salah satu pendekatan penting yang ditawarkan Islam adalah *maqasid al-syari'ah*, yakni tujuan-tujuan luhur dari syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Pendekatan ini memberikan kerangka komprehensif dalam merancang kebijakan pembangunan, termasuk dalam mengatasi problem pengangguran melalui pemberdayaan SDM secara integral.

1. Solidaritas Sosial ('Ashabiyyah) sebagai Fondasi Kekuatan Ekonomi

Ibn Khaldun, seorang pemikir Muslim terkemuka dalam bidang sejarah dan sosiologi, dalam karya monumentalnya *Muqaddimah*, menekankan pentingnya solidaritas sosial atau 'ashabiyyah sebagai fondasi pembangunan peradaban dan kekuatan ekonomi. Menurutnya, kelompok masyarakat yang memiliki solidaritas tinggi cenderung mampu bertahan menghadapi krisis, memperkuat kohesi sosial, dan bekerja sama dalam menciptakan kemakmuran kolektif.

Solidaritas sosial ini menjadi prasyarat penting dalam membangun kekuatan ekonomi yang berkeadilan. Dalam konteks modern, nilai 'ashabiyyah dapat diterjemahkan sebagai semangat gotong-royong, kerja sama sosial, dan tanggung jawab kolektif. Artinya, pengentasan pengangguran tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, lembaga pendidikan, dan institusi keagamaan.

Dengan demikian, membangun SDM bukan hanya investasi individu, melainkan juga proyek bersama yang dilandasi oleh semangat solidaritas dan kesadaran kolektif. Kekuatan ekonomi umat akan tumbuh ketika setiap individu merasa memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan bersama dan saling mendukung satu sama lain.

2. Kritik Islam terhadap Model Pembangunan Modern

Model pembangunan konvensional yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) sering kali tidak mampu menjawab akar persoalan kemiskinan dan pengangguran secara komprehensif. Pendekatan ini umumnya



menilai keberhasilan pembangunan berdasarkan indikator makroekonomi, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), arus investasi asing, serta kinerja ekspor, tanpa diimbangi dengan perhatian yang memadai terhadap aspek distribusi keadilan dan kualitas hidup masyarakat. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang dicapai cenderung bersifat agregatif dan tidak selalu mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang merata di tingkat individu maupun kelompok sosial.

Dalam praktiknya, orientasi yang berlebihan pada indikator makroekonomi sering kali menghasilkan fenomena *growth without equity*, di mana pertumbuhan ekonomi tidak diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesempatan kerja. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan angka-angka ekonomi tidak secara otomatis berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Bahkan, dalam beberapa kasus, pertumbuhan yang tidak inklusif justru memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memperkuat struktur ketimpangan yang sudah ada sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan inheren dalam model pembangunan konvensional yang kurang sensitif terhadap dimensi keadilan sosial.

Lebih lanjut, pendekatan pembangunan yang bersifat teknokratis dan berorientasi pada efisiensi pasar cenderung mengabaikan aspek kualitas hidup yang bersifat non-material, seperti akses terhadap pendidikan yang bermutu, layanan kesehatan yang memadai, serta lingkungan sosial yang kondusif. Padahal, dimensi-dimensi tersebut merupakan faktor penting dalam membentuk kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia. Ketika pembangunan hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kualitas manusia, maka hasil yang dicapai menjadi tidak berkelanjutan dan rentan terhadap berbagai krisis sosial.

Dalam pandangan Islam, pendekatan semacam ini dipandang bersifat reduksionis karena memisahkan antara pembangunan ekonomi dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasarinya. Islam memandang pembangunan sebagai proses yang menyeluruh dan terintegrasi, yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan material, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari capaian ekonomi, melainkan juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia, menjaga martabatnya, serta menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis.



Sumber daya manusia dalam perspektif Islam tidak diposisikan sekadar sebagai faktor produksi dalam sistem ekonomi, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki nilai intrinsik dan hak-hak fundamental yang harus dihormati. Manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki dimensi fisik, intelektual, dan spiritual yang harus dikembangkan secara seimbang. Dengan demikian, pembangunan sumber daya manusia dalam Islam tidak hanya berorientasi pada peningkatan keterampilan dan produktivitas ekonomi, tetapi juga mencakup pembinaan moral, penguatan etika, serta peningkatan kesadaran spiritual.

Lebih jauh, Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan yang layak, serta kehidupan yang bermartabat. Prinsip-prinsip seperti keadilan distributif, solidaritas sosial, dan tanggung jawab kolektif menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks ini, pengangguran dan kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ketidakadilan sosial yang harus diatasi melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

Selain itu, pendekatan pembangunan dalam Islam juga menekankan aspek keberlanjutan (*sustainability*), di mana pengelolaan sumber daya dilakukan secara bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan generasi masa kini dan mendatang. Hal ini mencakup pengembangan sumber daya manusia yang tidak hanya kompeten secara ekonomi, tetapi juga memiliki kesadaran etis dalam memanfaatkan sumber daya secara bijaksana. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.

Dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan model pembangunan konvensional, diperlukan adanya rekonstruksi paradigma pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada manusia. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pembangunan sumber daya manusia menawarkan kerangka konseptual yang lebih komprehensif dalam menjawab persoalan kemiskinan dan pengangguran. Pendekatan ini tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga mengedepankan dimensi moral, sosial, dan spiritual, sehingga mampu menciptakan sistem pembangunan yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berkelanjutan.



3. Peran Negara dalam Mewujudkan Pembangunan SDM

Dalam kajian Yilmaz, ekonomi Islam dikatakan menawarkan kritik tajam terhadap sistem pasar bebas (*laissez-faire*) yang kerap mengabaikan nilai-nilai sosial dan memperlebar jurang kesenjangan. Islam justru menekankan pentingnya campur tangan negara dalam menjaga keseimbangan sosial melalui regulasi pasar, subsidi pendidikan, pelatihan kerja, dan perlindungan terhadap kelompok miskin.

Dengan demikian, negara dalam Islam tidak bersikap netral terhadap persoalan ketidakadilan, melainkan aktif sebagai agen penyeimbang dan pelindung. Pembangunan SDM menjadi proyek peradaban yang harus melibatkan kebijakan strategis negara dalam mendidik, melatih, dan menyediakan lapangan kerja yang layak bagi rakyatnya. Dalam hal ini, peran negara tidak hanya administratif, tetapi juga ideologis dalam mengarahkan pembangunan menuju visi Islam yang rahmatan lil 'alamin.

4. Masalah Mursalah dalam Kebijakan Publik

Konsep masalah mursalah dalam ushul fiqh memberikan ruang bagi negara untuk merumuskan kebijakan publik yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah, tetapi sejalan dengan prinsip-prinsip umum syariat. Dalam konteks pembangunan SDM, konsep ini sangat relevan karena membuka peluang bagi pemerintah untuk berinovasi dalam menciptakan kebijakan pelatihan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selama kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah, maka hal tersebut dibenarkan dalam kerangka hukum Islam. Dengan demikian, pengembangan SDM dapat menjadi ranah strategis bagi negara untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi pengangguran melalui pendekatan kebijakan yang progresif namun tetap dalam koridor *maqasid al-syari'ah*.

erdasarkan analisis tersebut, rekonstruksi kebijakan pembangunan sumber daya manusia dalam mengatasi pengangguran dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan strategis.

Pertama, integrasi antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan tidak hanya harus menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan industri. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan vokasi, pelatihan kerja berbasis kompetensi, serta pengembangan kewirausahaan.



Kedua, penguatan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif maqasid, pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan bagian dari upaya menjaga kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah perlu mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai sumber penciptaan lapangan kerja baru.

5. Maqasid al-Syari'ah sebagai Kerangka Pemberdayaan Manusia

Pendekatan *maqasid al-syari'ah* memberikan perspektif menyeluruh dalam membangun manusia seutuhnya. Tujuan-tujuan utama syariat, seperti menjaga akal, jiwa, dan harta, beririsan langsung dengan prinsip-prinsip dasar pembangunan SDM. Pelaksanaan program pendidikan berkualitas bertujuan untuk menjaga dan mengembangkan akal; pelatihan kerja melindungi harta dan mata pencaharian; dan perlindungan sosial serta kesehatan bertujuan untuk menjaga jiwa.

Ketika pemerintah menjalankan program-program seperti beasiswa pendidikan, pelatihan vokasi, perlindungan pekerja migran, dan bantuan kewirausahaan, maka secara tidak langsung ia tengah menegakkan *maqasid al-syari'ah*. Artinya, keberhasilan pembangunan SDM bukan hanya dilihat dari indikator ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemuliaan bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga tantangan sosial dan moral yang terkait erat dengan kualitas pengembangan sumber daya manusia. Pendekatan pembangunan konvensional yang terutama menekankan pertumbuhan ekonomi seringkali gagal mengatasi pengangguran pada akar strukturalnya, karena cenderung mengabaikan pertimbangan etika, nilai-nilai spiritual, dan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Dari perspektif Islam, pengembangan sumber daya manusia dipahami sebagai proses holistik yang bertujuan untuk membina individu yang berwawasan luas yang tidak hanya memiliki kompetensi intelektual dan keterampilan profesional tetapi juga integritas moral dan tanggung jawab sosial. Kerangka Maqasid al-Shari'ah memberikan landasan konseptual yang komprehensif untuk merumuskan kebijakan pengembangan manusia, karena tujuan hukum Islam



menekankan perlindungan dan pelestarian agama, kehidupan, akal budi, keturunan, dan kekayaan.

Temuan menunjukkan bahwa rekonstruksi kebijakan pengembangan sumber daya manusia dalam kerangka pemikiran politik Islam dapat diimplementasikan melalui beberapa strategi kunci. Ini termasuk menyelaraskan sistem pendidikan dengan tuntutan pasar tenaga kerja, memperkuat pelatihan kejuruan dan program kewirausahaan, mempromosikan pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat, dan meningkatkan peran negara dalam menetapkan kebijakan publik yang adil. Pendekatan seperti itu tidak hanya bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi juga berupaya untuk membina manusia yang bermartabat dan produktif.

Oleh karena itu, mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqasid al-Shari'ah ke dalam kebijakan pengembangan sumber daya manusia menawarkan kerangka kerja konseptual dan praktis untuk mengatasi pengangguran sekaligus mempromosikan sistem pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpusat pada manusia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Shahih al-Bukhari: Terjemah Lengkap*. Diterjemahkan oleh Muhammad Muhsin Khan. Riyadh: Darussalam, 1997.

— — —. *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Zakah, Bab: Al-Istighna' 'an al-Nas, hadis no. 1470. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Kairo: Maktabah Dar al-Turath, 1960.

Azmi, Ilhamie Abdul Ghani. "Human Capital Development and Organizational Performance: A Focus on Islamic Perspective." *Jurnal Syariah* 17, no. 2 (2009): 353-372.

Hasan, Muhammad Hi. "Human Capital in Islamic Perspective." *Proceedings of International Conference of Business and Social Sciences (ICOBUSS)* 1, no. 1 (2020): 155-165.

Izzan, Ahmad. "Maslahah sebagai Landasan Formulasi Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (Desember 2013): 277-289.

Jahroni, dan Didit Darmawan. "Islamic Human Capital Implementation as Effective Framework in Islamic Human Capital Management." *Journal of Social Science Studies* 1, no. 2 (2021): 101-113.

— — —. "Islamic Human Capital Implementation as Effective Framework in Islamic Human Capital Management." *Journal of Social Science Studies* 1, no. 1 (2021): 239-244.

Khoiruddin. "Analisis Teori 'Ashabiyyah Ibn Khaldun sebagai Model Pemberdayaan Ekonomi Umat." *ASAS: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8, no. 1 (Januari 2016): 1-12.

Sudarto, Aye, Ani Nurul Imtihanah, dan Rina Elmaza. "Human Development Index and Maqoshid Syariah." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2023): 95-105.



Suma, M. Amin. "Maqashid Syariah dan Implikasinya terhadap Pembangunan Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 2 (2007): 152.

Yilmaz, Ercan. "Behavioral and Islamic Economics Critique Mainstream Views on Unemployment: A Joint Perspective." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14, no. 3 (2023): 417-434.



© 2026 by the authors. Published as an open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).